

## ABSTRAK

**Tesis ini berjudul** “Politik Pendidikan Islam dalam Perspektif Teori Hegemoni Antonio Gramsci (Telaah Terhadap PP. No 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan) yang disusun **oleh** Muhammad Aminullah NIM. F53212276

**Kata Kunci:** Politik Pendidikan, PP. No. 55 Tahun 2007, Hegemoni Gramsci.

Keinginan terakomodasinya pendidikan agama dan keagamaan oleh pemerintah kini mendapatkan angin segar dengan hadinya PP No 55 tahun 2007. Namun kehadiran peraturan pemerintah ini tidak bisa serta merta diterima apa adanya. Pasalnya sebelum peraturan ini muncul, ada serangkaian peristiwa yang dirasa sangat korelatif. Misalnya kebijakan bantuan beasiswa bagi Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur. Kebijakan ini awalnya menuai banyak kritik, baik dari akademisi ataupun sikap pemerintah sendiri.

Kritik ini didasarkan pada pertama, ada usaha sistematis untuk memberikan bantuan profesionalisme dan tunjangan bagi guru Madrasah Diniyah, yang secara Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak diakui dan diatur secara formal. Kedua, adalah tanggapan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi yang menyebut bahwa bantuan Beasiswa Pendidikan dan tunjangan untuk Guru Madrasah Diniyah inkonstitusional dan tidak berdasar.<sup>2</sup> Formalisasi Madrasah Diniyah yang dilakukan oleh Gubernur lebih condong sebagai implementasi kontrak politik dengan para Kiai pendukungnya. Fakta di lapangan lebih unik, ada beberapa pesantren yang dulunya tidak memiliki Madrasah Diniyah, sekarang berlomba-lomba untuk mendirikan Madrasah Diniyah agar dapat mengakses anggaran pemerintah.

Disisi lain, ada motif keinginan pemerintah untuk memutus mata rantai faham radikalisme islam dengan mengontrol lembaga pendidikan keagamaan. Hal ini disebabkan kasus-kasus terorisme yang lagi marak baik skala internasional maupun nasional. Mulai kasus bom bunuh diri di WTC NewYork hingga kasus bom bunuh diri di Bali. Peristiwa terorisme ini ditengarai berakar pada faham radikalisme islam. Selain Indonesia secara demografis memiliki warga yang nota bene beragama islam, Indonesia juga memiliki pendidikan keagamaan asli pribumi yang cukup *trend* seperti pondok pesantren dan madrasah diniyah. Pendidikan keagamaan ini dikhawatirkan menjadi lumbung-lumbung kekuatan radikalisme islam sehingga perlu control oleh pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berasumsi bahwa ada satu disiplin ilmu pengetahuan atau model pendekatan teoritik yang dapat mengurai benang kusut proses pembentukan kebijakan ini. Yakni disiplin ilmu politik pendidikan, sebagai disiplin ilmu, yang membahas tentang proses pembentukan, landasan, dan formulasi kebijakan. Kemudian, akan dianalisis menggunakan Teori Hegemoni Antonio Gramsci. Yaitu sebuah teori bisa mengungkap apakah perilaku sosial ini, sengaja digunakan untuk ‘membohongi’ atau ‘mengecoh’ paradigma masyarakat umum atau tidak.

Penelitian ini berbasis pada *library research*, dengan tujuan mengurai benang kusut purba sangka terhadap peraturan pemerintah ini. Dari proses penggalan data dan fakta dari pelbagai sumber. Penulis berkesimpulan bahwa; PP. No. 55 Tahun 2007 dalam perspektif hegemoni Antonio Gramsci merupakan bentuk kuat pemerintah untuk mengontrol pendidikan agama dan keagamaan. Ijtihad politik pendidikan pemerintah ini, merupakan bagian dari system hegemonik dari pada usaha ikhlas pemerintah dalam membuka akses seluas-luasnya kepada pendidikan keagamaan. Hal ini disebabkan dominasi kuat pemerintah dalam membatasi gerak-gerik pendidikan agama dan keagamaan.

---

<sup>2</sup> Lihat Merdeka.com “*Mendagri : APBD dilarang Madrasah Diniyah*”.  
<http://m.merdeka.com/peristiwa/> (diakses pada 23 Maret 2014)